



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA STRATEGIS 2017 - 2022



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2017



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA STRATEGIS 2017 - 2022



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i-ii
Daftar Isi		iii-iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penyusunan	7
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12
	2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
	2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	33
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
	3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD	40

	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	45
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	45
	4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII	PENUTUP	60

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)”. SELANJUTNYA Renstra PD tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala PD, berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD “.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu dari Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan RPMJD 2017-2022, mendukung sepenuhnya Rencana Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun berdasarkan ketentuan dalam RPJMD 2017-2022 dan merupakan pedoman dan acuan bagi Sekretariat Dewan dan seluruh aparatur Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2017-2022 ini disusun, semoga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SEKRETARIS DPRD

SYAIFUDDIN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630312 198503 1 013

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan di daerah menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Renstra Sekretariat DPRD merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi dan arah kebijakan, program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indikator kinerjanya untuk mencapai sasaran dalam RPJMD.

Renstra Sekretariat DPRD merupakan pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD

harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Kementerian/lembaga dan PD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapan dari tersusunnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari provinsi yang mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 menjadi acuan ataupun pedoman PD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan perencanaan tahunan yang disinkronkan dengan

program/kegiatan Kementerian/Lembaga dan PD Provinsi sebagai upaya dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6) .

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam memberikan layanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, Sekretariat Dewan mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk memberikan dukungan administratif dan operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Strategis(Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban OPD pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dan diwujudkan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Sekretariat DPRD, fungsi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD dengan RPJMD, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renstra dan sasaran

penyusunan dokumen Renstra bagi daerah yang bersangkutan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Memberikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset modal, dan lain-lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bagian ini mengemukakan prasarana dan sarana yang ada untuk menunjang kerja di Sekretariat DPRD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.

Bagian Ini Menjelaskan Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan perangkat daerah yang bersifat Internal dan bersifat Eksternal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut sehingga dapat menjadi bahan untuk perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra perangkat daerah.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis.

Pada bagian ini diriview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah

yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah yang selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD dan disajikan dalam bentuk tabel.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD dengan Tujuan dan sasaran RPJMD.

Bagian ini mengemukakan tentang kesesuaian hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun mendatang dan disampaikan dalam bentuk tabel

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta penyajiannya menggunakan tabel.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan juga disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VIII. PENUTUP

B A B II

**GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SEKRETARIS DEWAN

Tugas : Membantu gubernur dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang umum dan keuangan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan penetapan dan verifikasi perencanaan program kerja Bagian Umum dan Keuangan;
2. Penyelenggara pengoordinasian program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;
3. Penyelenggaraan pengoordinasian penatausahaan keuangan, perbendaharaan keuangan program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;
4. Penyelenggaraan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;

5. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, sekretariat, tata usaha pimpinan, manajemen aset, arsip dan perpustakaan;
6. Penyelenggaraan pemngendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bagian Umum & Keuangan;
7. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas: menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan perencanaan, penagendalian dan evaluasi program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;
3. Pelaksanaan penatausahaan Kas dan Anggaran Belanja;
4. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung;

5. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran dan pembinaan administrasi dan perbendaharaan keuangan;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan verifikasi atas pengelolaan keuangan;
7. Pelaksanaan pengujian pembayaran;
8. Pelaksanaan dan penyiapan bahan klarifikasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan bahan tindak lanjut;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat DPRD;
10. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian.

Fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

3. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Pimpinan DPRD;
4. Pelaksanaan pengelolaan barang inventaris dan barang habis pakai, surat menyurat serta penggandaan;
5. Pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan tenaga ahli DPRD;
6. Pelaksanaan penyusunan kinerja pegawai;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
8. Pelaksanaan penyusunan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan perpustakaan dan arsip;
9. Pelaksanaan urusan administrasi pengelolaan aset serta distribusi barang;
10. Pelaksanaan administrasi keanggotaan DPRD;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
12. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN RISALAH, KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi

dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bagian Risalah, kajian Hukum dan Perundang-undangan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan, pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Risalah, kajian Hukum dan Perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah Provinsi;
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan dialog antara anggota DPRD dengan pejabat pemerintahan dan/atau masyarakat;
5. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kode etik DPRD;
6. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan, evaluasi dan pelaksanaan tata tertib DPRD;
7. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan jadwal, risalah, notulen dan catatan rapat DPRD;
8. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan rapat DPRD;
9. Penyelenggaraan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD melalui komisi, fraksi dan pimpinan DPRD;
10. Penyelenggaraan fasilitasi penyediaan tenaga ahli DPRD;

11. Penyelenggaraan fasilitasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD;
12. Penyelenggaraan verifikasi penyusunan naskah pidato/ sambutan pimpinan dalam rapat DPRD;
13. Penyelenggaraan fasilitasi fungsi anggaran DPRD pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara dan pembahasan serta pengesahan APBD/APBD Perubahan;
14. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pokok pikiran DPRD;
15. Penyelenggaraan fasilitasi pembahasan pertanggungjawaban pemerintah daerah provinsi;
16. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan;
17. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
18. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUB BAGIAN RISALAH RAPAT DAN FASILITASI KELENGKAPAN DPRD

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis risalah rapat dan fasilitasi alat kelengkapan DPRD serta

partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Risalah rapat dan Fasilitasi Alat Kelengkapan DPRD;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan jadwal, risalah, notulen, dan catatan rapat DPRD;
3. Pelaksanaan perencanaan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD melalui komisi, fraksi dan pimpinan DPRD;
4. Pelaksanaan penyusunan naskah pidato/sambutan pimpinan dalam rapat DPRD;
5. Pelaksanaan fasilitasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD;
6. Pelaksanaan perencanaan fasilitasi fungsi anggaran DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara dan pembahasan serta pengesahan APBD/APBD Perubahan;
7. Pelaksanaan perencanaan fasilitasi rapat DPRD;
8. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan pokok pikiran DPRD;
9. Pelaksanaan fasilitasi pembahasan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

11. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

B. SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kajian hukum dan perundang-undangan serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Fungsi:

1. Penyusunan program kerja Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
3. Pelaksanaan fasilitasi pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah;
4. Pelaksanaan perencanaan kegiatan dialog antara anggota DPRD dengan pejabat pemerintahan dan/atau masyarakat;
5. Pelaksanaan verifikasi data/bahan duklungan jaringan aspirasi masyarakat;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kode etik DPRD;

7. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan, evaluasi dan pelaksanaan tata tertib DPRD;
8. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN RUMAH TANGGA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, ANTAR LEMBAGA, PROTOKOL

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, analisis dan perumusan kebijakan teknis prioritas, strategi dan arah kebijakan teknis kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, antar lembaga, keprotokoleran.

Fungsi:

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Rumah Tangga dan hubungan masyarakat, antar lembaga dan protokol;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi perumusan kebijakan teknis kerumahtanggaan, protokol, hubungan masyarakat dan antar lembaga;
3. Penyelenggaraan verifikasi bahan komunikasi publik melalui publikasi dan advertorial kegiatan DPRD;

4. Penyelenggaraan koordinasi tata laksana keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD dan pengaturan agenda kegiatan pimpinan dan anggota DPRD;
5. Penyelenggaraan verifikasi dan fasilitasi pengolahan data/bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi kerjasama antar lembaga tingkat daerah dan pusat;
7. Penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi informasi dan kegiatan pimpinan DPRD dalam Forkompimda;
8. Penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi dokumentasi visual dan gambar kegiatan DPRD;
9. Penyelenggaraan koordinasi kecukupan perlengkapan kerumahtanggaan DPRD dan sekretariat;
10. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan dan perlengkapan pendukung bangunan gedung kantor dan rumah dinas jabatan;
11. Penyelenggaraan koordinasi pengamanan di lingkungan Sekretariat DPRD;
12. Penyelenggaraan koordinasi kebersihan rumah dinas dan Sekretariat DPRD;
13. Penyelenggaraan pemeliharaan manajerial pengemudi dan kendaraan dinas operasional DPRD;
14. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bagian

- kerumahtanggaan, protokol, hubungan masyarakat dan antar lembaga;
15. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 16. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis rumah tangga dan urusan dalam.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Rumah Tangga Dan Urusan Dalam;
2. Pelaksanaan perencanaan kecukupan perlengkapan kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
3. Pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perlengkapan pendukung bangunan gedung kantor dan rumah dinas jabatan;
4. Pelaksanaan perencanaan pengamanan di lingkungan Sekretariat DPRD;
5. Pelaksanaan perencanaan kebersihan rumah dinas dan Sekretariat DPRD;

6. Pelaksanaan perencanaan pemeliharaan manajerial pengemudi dan kendaraan dinas operasional DPRD;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, ANTAR LEMBAGA DAN PROTOKOL

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, dan menentukan analisis dan perumusan kebijakan teknis Subbagian Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga dan Protokol.

Fungsi :

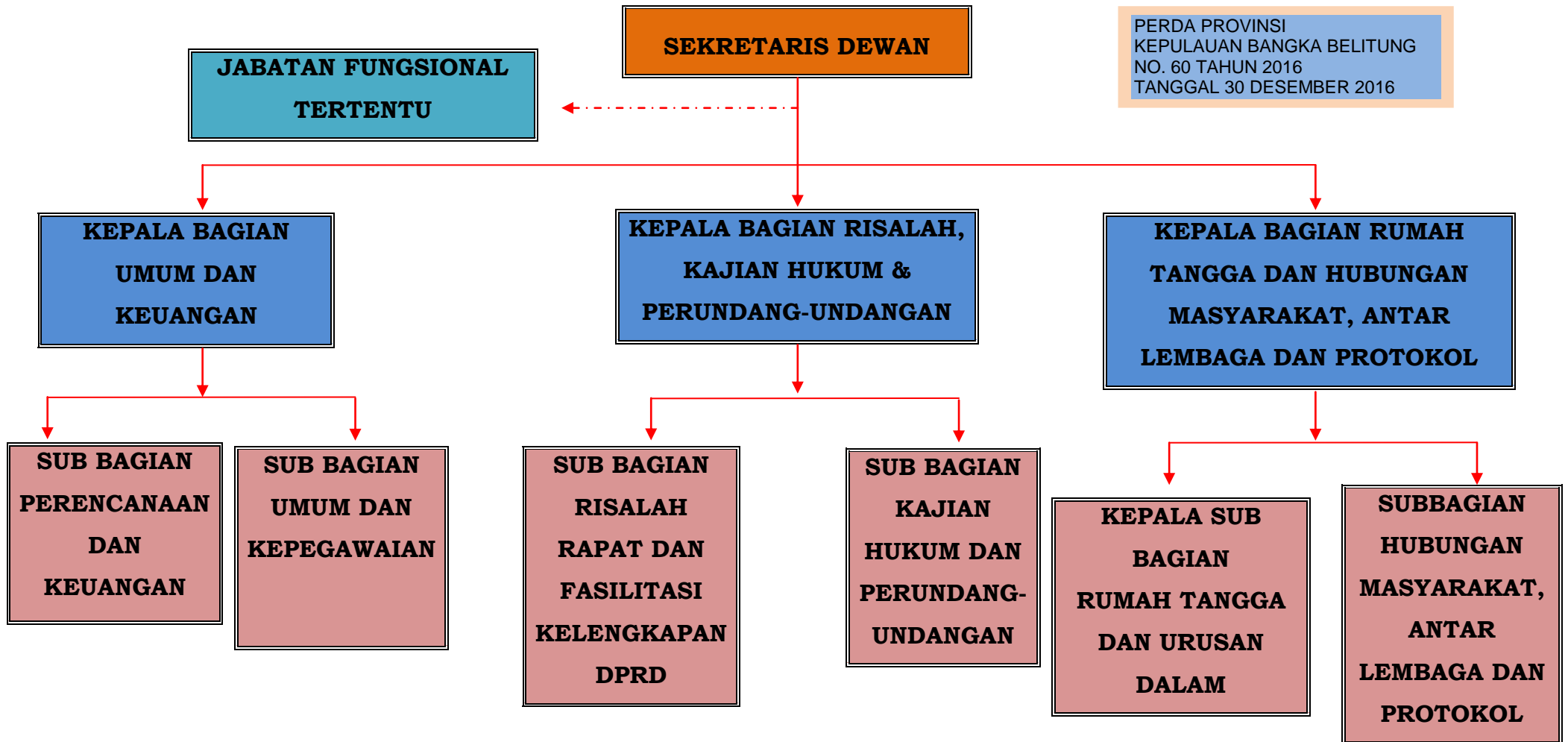
1. Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga dan Protokol;
2. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan komunikasi publik melalui publikasi dan advertorial kegiatan DPRD;

3. Pelaksanaan tatalaksana keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD dan pengaturan agenda kegiatan pimpinan dan anggota DPRD;
4. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi pengolahan data/bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat;
5. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga tingkat daerah dan pusat;
6. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan informasi dan kegiatan pimpinan DPRD dalam Forkopimda;
7. Pelaksanaan perancangan dokumentasi visual dan gambar kegiatan DPRD;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Di bawah ini adalah Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

TABEL 2.1
STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dengan struktur organisasi yang ada tersebut, pendelegasian tugas dan fungsi menjadi jelas dengan didukung oleh personil yang ada. Mengenai personil yang ada di Sekretariat Dewan masih menjadi kendala dengan beberapa persoalan :

- a. Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai.
- b. Beragam tingkat pendidikan aparatur yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Rendahnya tingkat disiplin aparatur.
- d. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih kurang.

Dari struktur organisasi yang ada, untuk jabatan Eselon IIa terisi 1 (satu) orang, jabatan Eselon IIIa terisi 3 (tiga) orang, dan jabatan Eselon IVa terisi 6 (enam) orang. Semua jabatan struktural tersebut semua sudah terisi. Sementara itu jumlah personil Sekretariat Dewan sampai bulan Agustus 2017 sebanyak 193 orang, yang tergambar dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.2.A
Komposisi Pendidikan Aparatur
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2017	
		PNS	PHL
1	SD	-	-
2	SMP	1	1

3	SMA	17	72
4	D-3	9	9
5	S-1	39	38
6	S-2	7	-
7	S-3	-	-
JUMLAH		73	120

TABEL 2.2.B
Komposisi Jenis Kelamin Aparatur
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2017			
		PNS		PHL	
		L	P	L	P
1	Sekretaris DPRD	1	-	-	-
2	Bagian Umum & Keuangan	11	12	11	19
3	Bagian Risalah Rapat & kajian Hukum Per-UU-an	15	13	3	19
4	Bagian Rumah Tangga Antar Lembaga, Protokol	17	4	47	21
JUMLAH		44	29	61	59

TABEL 2.2.C
Komposisi Pangkat/Golongan Aparatur
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2017	
		L	P
1	Golongan I/a	-	-
	Golongan I/b	-	-
	Golongan I/c	1	-
	Golongan I/d	-	-
2	Golongan II/a	-	1
	Golongan II/b	2	1
	Golongan II/c	11	3
	Golongan II/d	3	2
3	Golongan III/a	6	9
	Golongan III/b	12	9
	Golongan III/c	4	1
	Golongan III/d	3	2
4	Golongan IV/a	-	-
	Golongan IV/b	1	1
	Golongan IV/c	1	-
	Golongan IV/d	-	-
	JUMLAH	44	29

TABEL 2.2.D
Komposisi Eselon
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2017	
		L	P
1	Eselon I a	-	-
2	Eselon II a	1	-
3	Eselon III a	1	2
4	Eselon IV a	5	1
JUMLAH		7	3

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kondisi prasarana dan sarana kerja Sekretariat Dewan yang berada di Kompleks Perkantoran Gubernur Terpadu Kelurahan Air itam Pangkalpinang, cukup baik dan sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan tersedianya gedung dan ruangan kerja yang memadai dan sarana pendukung yang baik. Adapun masih terdapat kekurangan adalah belum cukupnya sarana kendaraan-kendaraan dinas bagi pegawai yang akan dipenuhi dimasa yang akan datang.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Persentase capaian Jumlah Peraturan Daerah yang diajukan oleh eksekutif yang dibahas dan disahkan oleh DPRD				15	15	18	18	20	8	9	14	14	16	53,3	60	77,7	77,7	80
	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD				2	2	4	4	4	-	-	-	5	7	0	0	0	125	175
	Rekomendasi-rekomendasi DPRD				30	32	32	34	34	39	45	52	60	85	130	141	163	176	250
	Penjaringan aspirasi masyarakat melalui masa Reses DPRD				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Prov. Kep. Babel

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,006,340,000	10,842,173,100	11,877,989,900	11,585,480,000	10,487,660,000	6,766,528,642	8,767,459,988	10,184,613,000	9,435,804,286	9,258,913,507	84.51	80.86	85.74	81.45	88.28	5.47	6.72
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,444,090,000	4,664,710,000	4,574,576,000	4,466,885,000	3,188,895,000	1,231,612,500	4,092,976,298	4,114,785,824	3,567,904,473	3,065,155,100	85.29	87.74	89.95	79.87	96.12	6.15	9.68
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	552,550,000	258,400,000	752,400,000	450,500,000	314,200,000	463,715,000	237,350,000	435,775,000	408,750,000	299,300,000	83.92	91.85	57.92	90.73	95.26	-39.64	(23.25)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180,000,000	180,000,000	307,297,000	176,000,000	335,660,000	177,550,000	103,520,000	134,869,300	152,878,140	333,082,074	98.64	57.51	43.89	86.86	99.23	3.60	4.40
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	638,125,000	499,550,000	-	-	-	516,855,600	343,663,000	-	-	-	81.00	68.79	-	-	-	-6.93	(12.60)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30,750,055,000	47,944,100,000	38,298,500,000	50,955,050,000	55,970,935,000	24,860,621,000	35,698,650,572	35,119,499,392	39,975,826,191	54,567,987,830	80.85	74.46	91.70	78.45	97.49	11.12	16.90
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	246,400,000	330,600,000	396,950,000	420,000,000	418,000,000	218,532,200	273,193,600	349,869,460	305,856,695	412,258,310	88.69	82.64	88.14	72.82	98.63	11.80	13.34
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	174,080,000	106,400,000	236,600,000	-	-	158,044,200	89,075,000	212,284,700	-	-	90.79	83.72	89.72	-	22.86	20.15

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan TUPOKSI Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu kinerja para anggota Dewan serta menunjang pemerintahan dalam membangun Provinsi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepla Daerah terpilih, oleh karena itu dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2012-2017 serta tantangan yang semakin berat pada tahun 2017-2022, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal

- a. Belum terpenuhinya dan optimalnya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan dan kualitas penyelesaian tugas.

- b. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan

dan penyelesaian tugas-tugas internal dikarenakan tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

- c. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, disebabkan adanya perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.
- d. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti pelantihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan bidang dan Tupoksinya.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia oleh aparatur di Sekretariat DPRD mengingat Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.
- f. Belum optimalnya pem-fungsi-an dan pemberdayaan tenaga ahli yang ada bagi anggota

DPRD sehingga menyebabkan lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang berasal dari Anggota DPRD.

2. Masalah yang bersifat eksternal

- a. Lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Masih Kurangnya koordinasi antara Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perangkat daerah terkait dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Masih Kurangnya pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program kerja perangkat daerah.

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN SEKRETARIAT DPRD

MASALAH POKOK	FAKTOR	
	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3
1. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya Belum optimal ;.	1. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal.	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
2. Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan belum optimal;	2. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2. Perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Tenaga Ahli dan Staf ahli	3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan	3. Semakin pesatnya

<p>bagi Anggota DPRD yang belum optimal</p>	<p>penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.</p> <p>4. Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang berasal dari Anggota DPRD.</p>	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</p> <p>4. Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
---	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2012. Maka

Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin diwujudkan pada periode 2017-2022 adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**. Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang

Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.

5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditempuh dengan melaksanakan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan Unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, merupakan salah satu perangkat daerah sebagai pelaksana :

Misi Kelima	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi
Tujuan	1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas 2. Meningkatkan Pembangunan Demokrasi
Program Prioritas Provinsi	1. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik 2. Pembangunan Berdemokrasi
Sasaran	1. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas 2. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
Indikator Sasaran	1. Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat 2. Skor aspek lembaga demokrasi
Strategi	1. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien 2. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
Arah Kebijakan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat 2. Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi
Program	1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 2. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan Kehumasan Dan Protokoler Dewan 3. Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penentuan isu-isu strategis

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari perangkat daerah dapat membantu perangkat daerah itu sendiri dalam mengatasi permasalahan pelayanan yang ada. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi telaahan adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 3.3.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
	Penghambat	Pendorong
1	2	3
1. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksinya Belum optimalnya ;.	1. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal.	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai

<p>2. Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan belum optimalnya;</p>	<p>2. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>lembaga perwakilan.</p> <p>2. Perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
<p>3. Tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD yang belum optimalnya</p>	<p>3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.</p>	<p>3. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</p>
	<p>4. Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang</p>	<p>4. Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi</p>

	berasal dari Anggota DPRD.	Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	----------------------------	---

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk itu, dalam menentukan isu-isu strategis di Sekretariat DPRD, berdasarkan pada faktor-faktor penghambat dan pendorong yang timbul sebagai permasalahan pada pelayanan perangkat daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Pemerintahan, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya;.
2. Belum optimalnya Peraturan Daerah sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan;
3. Belum optimalnya tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

**4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT DPRD**

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu di lakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategi daerah yang harus diselesaikan oleh suatu perangkat daerah pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas kecapaian sasaran yang ingin diraih dari masing- masing misi.

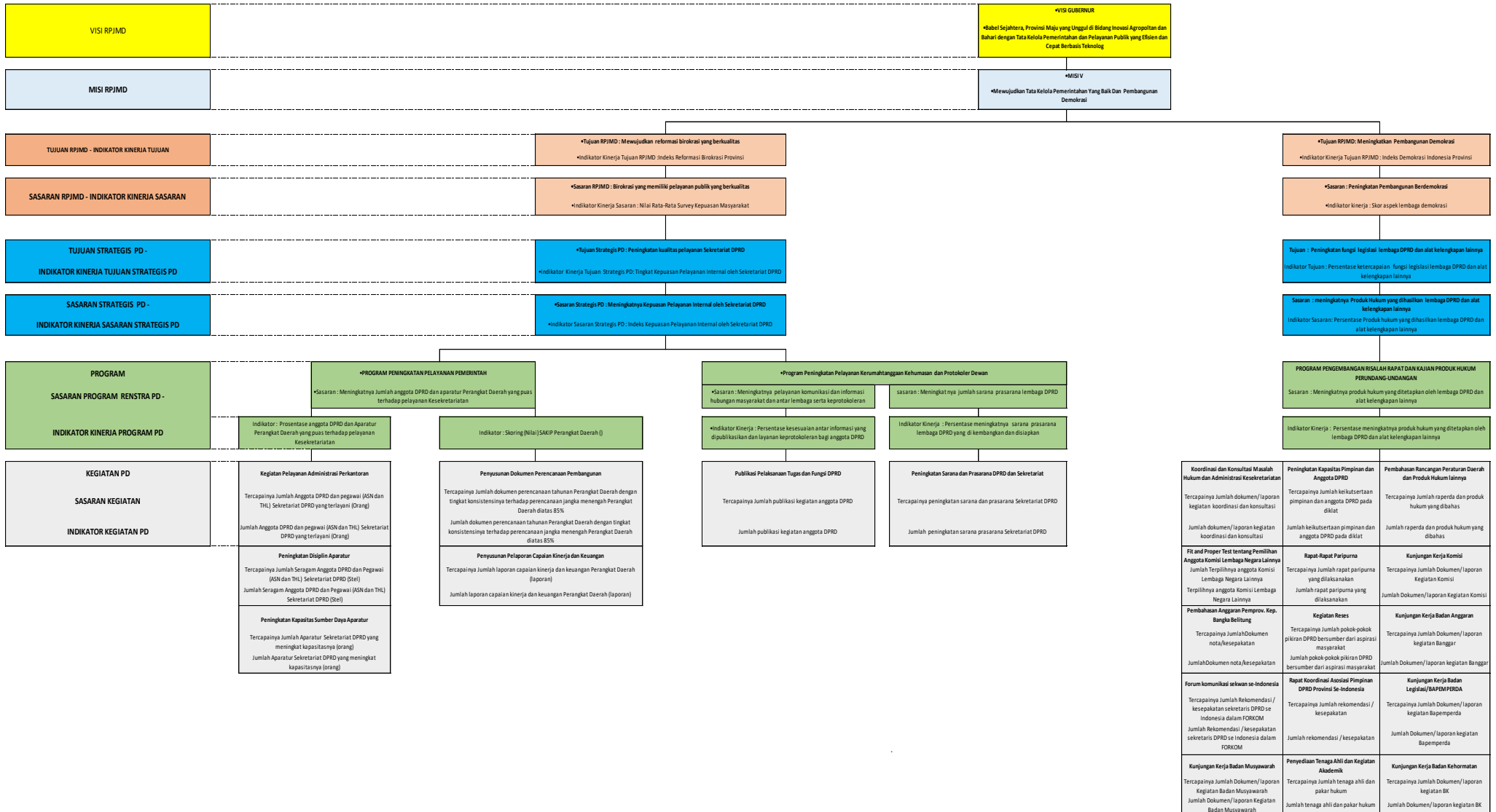
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

TABEL IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Tujuan	SasaranStrategis	IndikatorKinerjaUtama	Tahun /Rencana Target Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	1. Prosentase anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah yang puas terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90%	90%	90%	90%
2	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	2. Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	76%	77%	78%	79%	79%
3	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	3. Persentase kesesuaian antara informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleran bagi anggota DPRD	95%	95%	95%	95%	95%

4	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	4. Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang dikembangkan dan disiapkan	75%	76%	77%	78%	80%
5	Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Meningkatnya produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan lainnya	5. Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80%	80%	80%	80%	80%

CASCADE 2018 KESEUAIAN RPJMD DAN RENSTRA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TABEL 4.2

HUBUNGAN KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan	
"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Tercapainya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Ketercapaian kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		
											Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah ()		
											PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KKERUMAHTANGGAPAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleran bagi anggota DPRD	
												Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan	
		Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Persentase Produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya		

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
------	------	--------------	------------------------	---------------	-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------	--	---------------

								Persentase Ketepatan Waktu Penerimaan SK Peringkat dan Promosi ASN Pada Promosi, Mutasi dan Kenangkatan				
								Persentase Kesesuaian Antara Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Kebutuhan Organisasi			1 Persentase Jumlah Pegawai yang meningkat pendidikan formalnya;	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Peringkat Kualitas Pelayanan Penerimaan ASN melalui Jalur Umum dan Pendidikan		PROGRAM PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN	1 Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai dengan standar penilaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Tingkat Penilaian Kinerja		1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	1 Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Samsat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Persentase Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Disiplin ASN		2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	1 Persentase Unit Pelayanan publik Provinsi yang mendapatkan ISO	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Tingkat Pelayanan Kesejahteraan ASN		3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1 Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan	Urusan Penanaman Modal
								Tingkat sarana dan prasarana terhadap Pelayanan ASN berbasis Teknologi Informasi		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK	Urusan Pendidikan
								Persentase ASN terlatih;		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka	Urusan Pendidikan
				18 Birokrasi yang memiliki Pelayanan	2 Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)	1 Program Peningkatan pelayanan pemerintah yang	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan	persentase SKPD terlatih;		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BELITUNG	2 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung	Urusan Pendidikan
								Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai dengan standar penilaian		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BELITUNG	3 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung	Urusan Pendidikan

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
										7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PLUT KUMKM	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM	Urusan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
								Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Samsat		8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	1 Survey Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Keperawatan RSUP	Urusan Kesehatan
								Persentase Unit Pelayanan publik Provinsi yang mendapatkan ISO		9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN	1 Survey Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang	Urusan Kesehatan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik PTSP			2 Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar	Urusan Kesehatan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RIUMAH	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	Urusan Kesehatan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Urusan Kesehatan
								Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Pendidikan Khusus			2 Tingkat kelulusan Akreditasi RS Jiwa yang memenuhi standar akreditasi	Urusan Kesehatan
										11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN TIWA	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis	Urusan Kesehatan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM			2 Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana	Urusan Kesehatan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medis		12 PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes	Urusan Kesehatan
								Persentase elemen Akreditasi RS Umum Provinsi yang memenuhi standar akreditasi		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) yang memenuhi standar	Urusan Kesehatan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan		1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Persentase elemen Akreditasi RS Jiwa yang memenuhi standar akreditasi		2 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Keperawatan Kejiwaan		3 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan pengadaan secara elektronik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan		4 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEMERAYATAN	1 Persentase penyelesaian kasus tanah negara;	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Persentase pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah			2 Persentase Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
					Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah		1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa			3 Persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan pengadaan secara elektronik		5 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	1 Rasio Kepala daerah dan anggota legislative dengan yang terfasilitasi secara administrasi;	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Persentase penyelesaian kasus tanah negara;			2 Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Persentase pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah		6 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	1 Rasio MOU dengan jumlah usulan kerja sama Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		7 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	1 Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	Urusan Kearsipan
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan pengadaan secara elektronik		9 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	1 Pertambahan jumlah arsip yang dikelola (Dinamis dan Statis)	Urusan Kearsipan
								Persentase penyelesaian kasus tanah negara;		21 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	1 presentase perpustakaan terakreditasi;	Urusan Perpustakaan
								Persentase Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat			Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	Urusan Perpustakaan
								Persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan		11 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Mobil M-Cap	Urusan Persandian
								Rasio Kepala daerah dan anggota legislative dengan yang terfasilitasi secara administrasi;		12 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Masyarakat	Urusan Persandian
								Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-		13 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	1 Kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi sebagai dukungan kinerja OPD	Urusan Komunikasi dan Informatika

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
								Rasio MOU dengan jumlah usulan kerja sama Pemerintah Daerah			2 Pertumbuhan Jumlah nama domain dan subdomain instansi penyelenggara negara	Urusan Komunikasi dan Informatika
								Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip			3 Pertumbuhan Kapasitas prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah	Urusan Komunikasi dan Informatika
								Pertambahan jumlah arsip yang dikelola (Dinamis dan Statis)			4 Pertumbuhan insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	Urusan Komunikasi dan Informatika
								presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai		14 PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	1 Waktu pengurusan Rekomendasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
										15 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNKASI PUBLIK	1 persentase kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi	Urusan Komunikasi dan Informatika
								Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Mobil M-Cap		16 PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1 Persentase Jumlah penyediaan data base kependudukan tingkat provinsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik perencanaan pembangunan alokasi anggaran pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Persentase Peningkatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Masyarakat			Persentase Jumlah pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi sebagai dukungan kinerja OPD Provinsi, kab/kota			Persentase Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Pertumbuhan Jumlah nama domain dan subdomain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan provinsi. dan Jumlah aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi		17 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga ahli konstruksi yang bersertifikasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Pertumbuhan Kapasitas prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah		6 PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase ketaatan Tata Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
								Pertumbuhan insiden atau penyimpangan keamanan sistem		1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA	1 Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina;	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
								Waktu pengurusan Rekomendasi		2 PROGRAM PENGEMBANGAN PENYAYAGUNAAN SDA TEKNOLOGI	1 Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG);	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								persentase kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi			2 Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											3 Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik;	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
										3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	1 Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							2 Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik			4 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	1 Persentase aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan yang terbina;	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik;	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP			Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APDES tepat waktu)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina		1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Urusan Sosial
								Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya		2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	1 Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	Urusan Sosial
										3 PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	1 Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti	Urusan Sosial
										4 PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	1 Persentase lansia yang mengikuti olah raga khusus lansia	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
								Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM)			2 Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang dibina dalam bidang keolahragaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
							1 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan	Persentase aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas			3 Persentase Insan Olahraga yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
											4 Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Keolahragaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
										PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN	1 Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
								Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial			2 Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
								Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan		5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	1 Pertumbuhan lansia yang di dampingin hukum	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
								Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan		6 PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan	Urusan Kesehatan
										2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	1 Prosentase lansia yang dapat pembinaan keagamaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
											Persentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pembinaan keagamaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
										4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	1 Persentase masyarakat yang direhabilitasi sosial yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan
										PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase lansia potensial yang	Urusan Tenaga Kerja
											Persentase Exs korban Napza yang mendapatkan pelatihan ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja
											Persentase wanita Tunasosial yang	Urusan Tenaga Kerja
									Pertumbuhan lansia yang di dampingin hukum		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan keterampilan tenaga	Urusan Tenaga Kerja
										1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1 Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Urusan Sosial
									Persentase lansia yang dapat pembinaan keagamaan	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Urusan Sosial

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
											Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Urusan Sosial
										1 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1 Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
											1 Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						4 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan				PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak	Urusan Kesehatan
										2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Persentase Anak dan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Urusan Sosial
											Persentase anak korban kekerasan yang mendapat pendamping hukum	Urusan Penunjang Administrasi
						5 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		6 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1 Rasio Informasi pencegahan terhadap perempuan dan anak dengan pridiode satu tahun	Urusan Komunikasi dan Informatika
										1 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1 Persentase Kab/Kota Layak Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										2 PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase masyarakat yang memiliki akte kelahiran	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Persentase PMKS (anak) yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan	Urusan Sosial
										5 PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	1 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Urusan Kesehatan

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
										6 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1 Rasio Informasi pembangunan hak anak dengan pride satu tahun	Urusan Komunikasi dan Informatika
						6 Menjamin hak anak dalam pembangunan		Persentase PMKS (Anak Terlantar) yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial		1 PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1 Pertumbuhan kasus penistaan terhadap simbol negara	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
											2 Pertumbuhan kasus Konflik Sara	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
								Rasio Informasi pencegahan terhadap perempuan dan anak dengan pride satu tahun		2 PROGRAM Penguatan Kewaspadaan Nasional	1 Rasio rekomendasi koordinasi antar pemangku kepentingan dengan yang dijalankan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi			2 Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi		3 PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	1 Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				19 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1 Skor aspek kebebasan sipil	1 Program Peningkatan kebebasan sipil Masyarakat	1 Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Persentase PMKS (anak terlantar) yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial			2 Rasio Rekomendasi yang dikeluarkan dengan yang dilaksanakan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita			3 Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Rasio Informasi pembangunan hak anak dengan pride satu tahun		1 PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	1 Prosentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Pertumbuhan kasus penistaan terhadap simbol negara		2 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 Prosentase peningkatan kualitas Linmas	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Pertumbuhan kasus Konflik Sara		3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	1 Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Rasio rekomendasi koordinasi antar pemangku kepentingan dengan yang dijalankan		4 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	1 Prosentase penegakan/penindakan pelanggaran Perda	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota		1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	1 Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Urusan Administrasi Kependudukan dan

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
							2 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan			2 Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Rasio Rekomendasi yang dikeluarkan dengan yang dilaksanakan		1 PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	1 Persentase Partisipasi Pemilih.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya			1 Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
								Prosentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas			2 Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
					2 Skor aspek hak-hak politik	2 Program Peningkatan partisipasi politik masyarakat	1 Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Prosentase peningkatan kualitas Linmas		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1 Rasio Intensitas informasi berkaitan dengan program pembangunan berdemokrasi dengan	Urusan Komunikasi dan Informatika
								Prosentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP		2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1 persentase rekomendasi kajian tentang demokrasi yang digunakan dalam	Urusan Penunjang Administrasi
					3 Skor aspek lembaga demokrasi	3 Program pengembangan lembaga demokrasi	1 Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Prosentase penegakan/penindakan pelanggaran Perda		4 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	1 Persentase kegiatan yang mendukung pembangunan berdemokrasi yang teranggarkan dalam	Urusan Penunjang Administrasi
								Pertumbuhan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan		1 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	1 Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan	Urusan Sosial
								Persentase keterwakilan perempuan di lembaga publik		2 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	1 Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan dan Logistik/Peralatan Penanggulangan	Urusan Sosial
										3 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	1 Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca	Urusan Sosial
										4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1 Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang mendapatkan	Urusan Sosial
											Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana	Urusan Sosial
				20 Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulang	1 Indeks kapasitas daerah	1 Program peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan	1 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan	Rasio Intensitas informasi berkaitan dengan program pembangunan		5 PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN	1 Rasio stock pangan dengan jumlah penduduk di daerah rawan bencana	Urusan Pangan
										7 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1 Rasio Informasi tentang pencegahan dan penanggulangan bencana dengan priode	Urusan Komunikasi dan Informatika
										3 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	Kesehatan

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
								Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan		1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1 Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan dan Logistik/Peralatan Penanggulangan			2 Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai rawan banjir	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		2 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 Persentase desa yang masuk kedalam daerah rawan bencana yang terbentuk kelompok pemberdayaan masyarakat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan		3 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN	1 Persentase panjang DAS Daerah rawan bencana banjir yang dikelola dengan kelompok	Urusan Kehutanan
								Rasio stock pangan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana		4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	1 persentase tutupan hutan di kawasan Das rawan banjir	Urusan Kehutanan
						2 Program Pengembangan kawasan berbasis penanggulangan bencana	1 Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Rasio stock pangan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana		1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1 Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Rasio Informasi tentang pencegahan dan penanggulangan bencana dengan priode waktu satu tahun			2 Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
										2 PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	1 Persentase luas penataan permukiman kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		7 Terwujudnya pembangunan demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi					Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai		3 PROGRAM KEBINAMARGAAN	1 Pesentase jalan provinsi atau jalan menuju akses ke jalan kawaaan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai rawan banjir		4 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Pertumbuhan rekomendasi pengembangan kawasan hilir darah rawan bencana teluk bayur	Urusan Lingkungan Hidup
							2 Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Persentase desa yang masuk kedalam daerah rawan bencana yang terbentuk kelompok pemberdayaan masyarakat		1 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	1 Rata-rata waktu dari informasi bencana kejadian sampai pertama direpson/sampai lokasi bencana oleh BPBD	Urusan Sosial
								Persentase panjang DAS Daerah rawan bencana banjir yang dikelola dengan kelompok pemberdayaan masyarakat		2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1 Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Urusan Sosial
								persentase tutupan hutan di kawasan Das rawan banjir		1 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	1 rasio korban bencana dengan jumlah logistik yang disalurkan BPBD	Urusan Sosial

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
								Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1 rasio korban bencana dengan jumlah logistik yang disalurkan Dinas Sosial	Urusan Sosial
								Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir		3 PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan diri dan	Urusan Kesehatan
				21 Menurunkan tingkat ancaman	1 Indeks ancaman bencana	1 Program Peningkatan tanggap darurat	1 Peningkatan respon efektif terhadap kejadian bencana	Persentase luas penataan permukiman kawasan hilir daerah		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS	1 Rasio korban bencana dengan tenaga kesehatan yang dikirim	Urusan Kesehatan
								Persentase jalan provinsi atau jalan menuju akses ke jalan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur			2 Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	Urusan Kesehatan
					2 Indeks penduduk terpapar bencana	2 Program Peningkatan pelayanan terhadap korban bencana	1 Peningkatan kualitas pelayanan terhadap korban bencana	Pertumbuhan rekomendasi pengembangan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	1 Persentase Panjang Talud yang direhabilitasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Rata-rata waktu dari informasi bencana kejadian sampai pertama direpon/sampai lokasi bencana oleh BPBD			2 Persentase Panjang Normalisasi pada daerah yang direhabilitasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Rata-rata waktu dari informasi bencana kejadian sampai pertama direpon/sampai lokasi bencana oleh Dinas		2 PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	1 Persentase Jumlah rumah yang di rehabilitasi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
								rasio korban bencana dengan jumlah logistik yang disalurkan BPBD		3 PROGRAM KEBINAMARGAAN	1 Persentase Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								rasio korban bencana dengan jumlah logistik yang disalurkan Dinas Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan pendampingan psikologi	Urusan Sosial
				22 Menurunkan tingkat kerugian terhadap	1 Indeks kerugian bencana	1 Program Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat	1 Peningkatan pemenuhan infrastruktur dan rehabilitasi kejiwaan akibat bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan		4 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN	1 Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan	Urusan Sosial
										5 PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Persentase korban pasca bencana yang dilayani kesehatan	Urusan Kesehatan
										PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEIWAAN DAN	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan
								Persentase Panjang Talud yang direhabilitasi		1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	1 persentase tutupan hutan di kawasan Das	Urusan Lingkungan Hidup
								Persentase Panjang Normalisasi yang direhabilitasi		2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase BOD, COD dan TSS	Urusan Lingkungan Hidup

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
	6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas	8 Meningkatnya tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana					Persentase Jumlah rumah yang di rehabilitasi		3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	1 Pertumbuhan kriteria pengujian kualitas air	Urusan Lingkungan Hidup
								Persentase Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi		6 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	1 persentase luas kawasan konservasi yang terjaga	Urusan Kehutanan
										7 PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	1 Persentase kawasan kumuh yang dilengkapi dengan pengolahan air limbah rumah tangga	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				23 Peningkatan Kualitas Lingkungan	1 Indeks Air	1 Program Peningkatkan kualitas air	1 Pengendalian kualitas air			1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	1 Pertumbuhan kebijakan berkaitan dengan kualitas udara	Urusan Lingkungan Hidup
										2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase SO2 dan NO2.	Urusan Lingkungan Hidup
										3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	1 Pertumbuhan kriteria pengujian kualitas udara	Urusan Lingkungan Hidup
								persentase tutupan hutan di kawasan Das		4 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	1 Persentase kawasan hutan yang terbakar	Urusan Kehutanan
								Persentase Penaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan kualitas air		1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	1 Pertumbuhan kebijakan berkaitan dengan tutupan hutan	Urusan Lingkungan Hidup
					2 Indeks Udara	2 Program Peningkatan kualitas Udara	1 pengendalian kualitas udara	Pertumbuhan kriteria pengujian kualitas air		2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentase perusahaan yang di fasilitasi berkaitan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan	Urusan Lingkungan Hidup
								Pertumbuhan kawasan konservasi dan ekosistem perairan		3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	1 Pertumbuhan kriteria pengujian terhadap kualitas hutan	Urusan Lingkungan Hidup
								Persentase kawasan kumuh yang dilengkapi dengan pengolahan air limbah rumah tangga		4 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	1 persentase penanganan tindak pidana kehutanan	Urusan Kehutanan
								Pertumbuhan kebijakan berkaitan dengan kualitas udara		1 PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	1 Pertumbuhan kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Urusan Lingkungan Hidup

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Bidang Urusan
					3 Indeks Tutupan Hutan	3 Program peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan	1 Peningkatan tutupan hutan	Persentase perusahaan yang di fasilitasi dalam pengendalian kualitas udara		2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Persentas Perusahaan yang memiliki kajian lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup
								Pertumbuhan kriteria pengujian kualitas udara		3 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN	1 Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup
								Persentase kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap kualitas udara		4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 Persentase panjang Das dalam kondisi dan kualitas baik	Urusan Kehutanan
								Pertumbuhan kebijakan berkaitan dengan tutupan hutan		5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS	1 Sertifikat Akreditasi laboratorium	Urusan Lingkungan Hidup
					4 Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	4 Program pengendalian terhadap lingkungan Hidup	1 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan	Persentase perusahaan yang di fasilitasi berkaitan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan		6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN	1 Persentase lahan kritis di arel IUP yang reklamasi,	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
								Pertumbuhan kriteria pengujian terhadap kualitas hutan			2 Nilai jaminan reklamasi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
								persentase luas kawasan hutan lindung		6 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	1 Rasio jumlah sumur bor dalam dengan luas wilayah	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
								Pertumbuhan kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan		7 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	1 Pertumbuhan ekositem yang dilindungi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
								Persentas Perusahaan yang memiliki kajian lingkungan		8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	1 Persentase luas hutan produksi	Urusan Kehutanan
								Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan		9 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	1 Pertumbuhan Jumlah Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut yang ramah lingkungan	Urusan Kehutanan
								Persentase panjang Das dalam kondisi dan kualitas baik		1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	1 Pertumbuhan pemanfaatan energi baru terbarukan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
								Sertifikat Akreditasi laboratorium		2 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HTDUP	1 Pertumbuhan luas Kawasan TPA Regional yang dikendalikan dan ditata	Urusan Lingkungan Hidup

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan pernyataan tentang rumusan perencanaan yang komprehensif bagaimana suatu perangkat daerah mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Sedangkan Arah Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan untuk tindakan-tindakan tertentu.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 menjadi acuan bagi kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi anggota DPRD dan aparatur Perangkat Daerah di Sekretariat DPRD;
2. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran bagi Anggota DPRD;
3. Meningkatkan sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan di Sekretariat DPRD;
4. Meningkatkan ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya.

Sedangkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretariat DPRD memiliki Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah;
2. Peningkatan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya;
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD;
4. Peningkatan ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya.

TABEL V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VISI :	Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi		
MISI V :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD	Penguatan Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD	Peningkatan skoring SAKIP terhadap pelaksanaan perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD
		Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan	Peningkatan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan

		masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran bagi Anggota DPRD	antar lembaga serta keprotokoleran bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya
		Meningkatkan sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan di Sekretariat DPRD	Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD
Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Meningkatnya produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan lainnya	Meningkatkan kualitas produk hukum dari fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya berdasarkan produk hukum yang ditetapkan

B A B VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program adalah suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana.

Kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi perangkat daerah.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-

program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Utama :

**PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN
KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-
UNDANGAN**

Dengan Kegiatan :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Rapat-Rapat Paripurna
3. Kegiatan Reses

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
5. Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia.
6. Penyediaan Tenaga Ahli & Kegiatan Akademik
7. Koordinasi & Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan.
8. Kunjungan Kerja Komisi.
9. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah.
10. Kunjungan Kerja Badan Anggaran.
11. Badan Legislasi/Badan Pembentukan Peraturan Daerah
12. Badan Kehormatan.
13. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel.
14. Fit dan Proper Test Tentang Pemilihan Anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya.
15. Forum Komunikasi Sekwan Se-Indonesia

2. Program Pendukung

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN

Dengan Kegiatan :

1. Publikasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD & Sekretariat

3. Program Rutin :

**PROGRAM Peningkatan PELAYANAN
PEMERINTAH**

Dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan.
5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

TABEL VI.1
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KERA, TUJUAN, SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Prosentase anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah yang puas terhadap pelayanan kesekretariatan		90%	11.255.639.000	90%	12.426.202.900	90%	13.558.823.190	90%	14.914.705.509	90%	16.406.176.060		68.561.546.659		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Sekretariat DPRD yang terlayani (Orang)		245 orang	9.769.899.000	255 orang	10.746.888.900	265 orang	11.821.577.790	275 orang	13.003.735.569	285 orang	14.304.109.126		59.646.210.385	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang meningkat kapasitasnya (orang)		74 orang	636.000.000	77 orang	699.600.000	80 orang	769.560.000	83 orang	846.516.000	86 orang	931.167.600		3.882.843.600	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Sekretariat DPRD (Stel)		544 stel	799.740.000	562 stel	879.714.000	562 stel	967.685.400	570 stel	1.064.453.940	575 stel	1.170.899.334		4.882.492.674	Setwan	Prov. Kep. Babel
				Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah ()		76,00		77,00		78,00		79,00		79,00			-	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%		3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000		225.000.000	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan)		7 dokumen	25.000.000	7 dokumen	50.000.000	9 dokumen	50.000.000	9 dokumen	50.000.000	9 dokumen	50.000.000		225.000.000	Setwan	Prov. Kep. Babel
Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD		Program Peningkatan Pelayanan Kerumah tanggaan, Kehumasan dan Protokol Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleran bagi anggota DPRD		95%	7.298.010.000	95%	7.235.811.000	95%	7.959.392.100	95%	8.755.331.310	95%	9.630.864.441		40.879.408.851		
			Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah publikasi kegiatan anggota DPRD		30 publikasi	2.459.690.000	30 publikasi	2.705.659.000	30 publikasi	2.976.224.900	30 publikasi	3.273.847.390	30 publikasi	3.601.232.129		15.016.653.419	Setwan	Prov. Kep. Babel
				Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan dilaikan		75%		76%		77%		78%		80%			-	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	Jumlah peningkatan sarana prasarana Sekretariat DPRD		75%	4.838.320.000	76%	4.530.152.000	77%	4.983.167.200	78%	5.481.483.920	80%	6.029.632.312		25.862.755.432	Setwan	Prov. Kep. Babel
Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Meningkatnya produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya		PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya		80%	65.947.119.700	80%	72.556.831.670	80%	79.800.014.837	80%	87.767.516.321	80%	96.531.767.953		402.003.250.480		
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat		90 anggota	1.503.050.000	90 anggota	1.653.355.000	90 anggota	1.818.690.500	90 anggota	2.000.559.550	90 anggota	2.200.615.505		9.176.270.555	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas		18 Raperda/produk hukum lainnya	19.322.900.000	20 Raperda/produk hukum lainnya	21.255.190.000	23 Raperda/produk hukum lainnya	23.380.709.000	25 Raperda/produk hukum lainnya	25.718.779.900	28 Raperda/produk hukum lainnya	28.290.657.890		117.968.236.790	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum		8 tenaga ahli dan pakar hukum	729.390.000	9 tenaga ahli dan pakar hukum	802.329.000	10 tenaga ahli dan pakar hukum	882.561.900	11 tenaga ahli dan pakar hukum	970.818.090	12 tenaga ahli dan pakar hukum	1.067.899.899		4.452.998.889	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	Jumlah dokumen/ laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi		5 Dokumen/laporan	200.000.000	5 Dokumen/laporan	220.000.000	5 Dokumen/laporan	242.000.000	5 Dokumen/laporan	266.200.000	5 Dokumen/laporan	292.820.000		1.221.020.000	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Kunjungan kerja komisi	Jumlah Dokumen/ laporan Kegiatan Komisi		192 Dokumen/laporan	27.998.180.000	288 Dokumen/laporan	30.797.998.000	384 Dokumen/laporan	33.877.797.800	480 Dokumen/laporan	37.265.577.580	576 Dokumen/laporan	40.992.135.338		170.931.688.718	Setwan	Prov. Kep. Babel

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA, TUJUAN, SASARAN	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Kunjungan kerja badan musyawarah Bannus	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Bannus		6 Dokumen/ laporan	1.321.220.000	6 Dokumen/ laporan	1.453.342.000	6 Dokumen/ laporan	1.598.676.200	6 Dokumen/ laporan	1.758.543.820	6 Dokumen/ laporan	1.934.398.202		8.066.180.222	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Kunjungan kerja badan anggaran	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Banggar		6 Dokumen/ laporan	2.491.350.000	6 Dokumen/ laporan	2.740.485.000	6 Dokumen/ laporan	3.014.533.500	6 Dokumen/ laporan	3.315.986.850	6 Dokumen/ laporan	3.647.585.535		15.209.940.885	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Kunjungan kerja badan legislasi/pembentukan perda	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan Bapemperda		6 Dokumen/ laporan	1.927.030.700	6 Dokumen/ laporan	2.119.733.770	6 Dokumen/ laporan	2.331.707.147	6 Dokumen/ laporan	2.564.877.862	6 Dokumen/ laporan	2.821.365.648		11.764.715.127	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Kunjungan kerja badan kehormatan BK	Jumlah Dokumen/ laporan kegiatan BK		6 Dokumen/ laporan	939.900.000	6 Dokumen/ laporan	1.033.890.000	6 Dokumen/ laporan	1.137.279.000	6 Dokumen/ laporan	1.251.006.900	6 Dokumen/ laporan	1.376.107.590		5.738.183.490	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh Indonesia (ADPSI)	Jumlah rekomendasi / kesepakatan		3 kesepakatan	532.250.000	3 kesepakatan	585.475.000	3 kesepakatan	644.022.500	3 kesepakatan	708.424.750	3 kesepakatan	779.267.225		3.249.439.475	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan		3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	579.749.000	3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	637.723.900	3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	701.496.290	3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	771.645.919	3 paripurna istimewa, 12 paripurna biasa	848.810.511		3.539.425.620	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Reses	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat		3 dokumen/ laporan	7.424.100.000	3 dokumen/ laporan	8.166.510.000	3 dokumen/ laporan	8.983.161.000	3 dokumen/ laporan	9.881.477.100	3 dokumen/ laporan	10.869.624.810		45.324.872.910	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Pembahasan anggaran pemerintah prov.kep.babel	JumlahDokumen nota/kesepakatan		4 dokumen/ laporan	378.000.000	4 dokumen/ laporan	415.800.000	4 dokumen/ laporan	457.380.000	4 dokumen/ laporan	503.118.000	4 dokumen/ laporan	553.429.800		2.307.727.800	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Forum komunikasi sekwan se-Indonesia	Jumlah Rekomendasi / kesepakatan sekretaris DPRD se Indonesia dalam FORKOM		1 Dokumen/ Laporan	500.000.000	3 Dokumen/ Laporan	550.000.000	3 Dokumen/ Laporan	605.000.000	3 Dokumen/ Laporan	665.500.000	3 Dokumen/ Laporan	732.050.000		3.052.550.000	Setwan	Prov. Kep. Babel
			Fit and Proper Test tentang pemilihan anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya	Jumlah terpilihnya anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya		7 orang	100.000.000	15 orang	125.000.000	15 orang	125.000.000	15 orang	125.000.000	15 orang	125.000.000		600.000.000		
JUMLAH							84.500.768.700		92.218.845.570		101.318.230.127		111.437.553.140		122.568.808.454		512.044.205.990		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui bidang urusan yang ada dalam perangkat daerah telah menargetkan dan menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Prosentase anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah yang puas terhadap		90%	90%	90%	90%	90%	90%

	pelayanan Kesekretariatan							
	Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah ()		76	77	77	78	79	79
	Presentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleraan bagi anggota DPRD		95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan		75%	76%	77%	78%	80%	100%
	Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya		80%	80%	80%	80%	80%	80%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Disadari bahwa dalam perjalanannya nanti tidak terlepas dari kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala yang akan dihadapi dan kiranya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dan mendapat dukungan semua pihak.

Keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap menjalankan hak dan kewajiban konstitusinya adalah keberhasilan Dewan sendiri. Sementara dalam proses pelaksanaan hak tersebut ada kekurangan merupakan kekurangan kami di Sekretariat Dewan sebagai unsur pelayan administrasi kepada Dewan. Sekretariat Dewan hanya berusaha untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga terlaksana.

SEKRETARIS DPRD

SYAIFUDDIN, SH
NIP. 19630312 198503 1 013